

## ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh tawuran antar remaja yang semakin sering terjadi di Kota Lhokseumawe, Walikota meminta dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut. Dalam hukum pidana, kenakalan remaja diatur melalui beberapa pasal penting, seperti pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tahapan kolaborasi yang terjadi dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe serta mengetahui tingkat keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 4 informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dilakukan dalam 5 tahapan yaitu: 1) dialog tatap muka dalam *collaborative governance* melibatkan pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk atasi kenakalan remaja. meskipun tidak rutin, dialog ini membuka ruang komunikasi *stakeholders*. 2) Membangun kepercayaan antara aktor yang terlibat dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe terus dilakukan walaupun terdapat kurangnya kepercayaan terhadap pihak LSM. 3) Komitmen terhadap proses, Dinas PPPA menunjukkan komitmen dalam menjaga proses kolaborasi dengan tahapan, dasar hukum dan bentuk komitmen yang jelas. 4) Berbagi pemahaman sudah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi yang rutin dilaksanakan. 5) Hasil sementara terlihat dari manfaatnya, yaitu kerjasama antara aktor-aktor kolaborasi yang dirasa sudah dilaksanakan. Meskipun belum sepenuhnya berhasil karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Ukuran keberhasilan kolaborasi dilihat dari 3 item 1) Kepercayaan antar partisipan dalam mengatasi kenakalan remaja sudah terjalin dengan baik, karena setiap ada hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja pihak Polres juga terbuka mengenai informasi tersebut. 2) Indikator komitmen terhadap tujuan, para *stakeholders* menunjukkan komitmen terhadap tujuan dengan melakukan upaya pencegahan dan kegiatan yang berhubungan dengan mengatasi kenakalan remaja. 3) Berbagi informasi dilakukan dengan baik oleh *stakeholders* yang terlibat, mereka berbagi informasi baik kepada sesama aktor maupun kepada publik yang berhubungan dengan kenakalan remaja. Penulis menyarankan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan lebih dalam terhadap aktifitas remaja.

**Kata Kunci:** *Collaborative, Governance, Kenakalan Remaja,*

## ABSTRACT

This research was motivated by brawls between teenagers which were increasingly occurring in Lhokseumawe City, the Mayor asked for support from various parties to overcome this juvenile delinquency. In criminal law, juvenile delinquency is regulated through several important articles, such as articles 45, 46 and 47 of the Criminal Code. This research aims to determine the stages of collaboration that occur in overcoming the problem of juvenile delinquency in Lhokseumawe City and determine the level of success of this collaboration. This research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation with 4 informants as research subjects. The research results show that the collaboration process is carried out in 5 stages, namely: 1) face-to-face dialogue in collaborative governance involving the government, NGOs and the private sector to overcome juvenile delinquency. Although not routine, this dialogue opens up space for stakeholder communication. 2) Trust building between actors involved in handling juvenile delinquency in Lhokseumawe City continues to be carried out even though there is distrust towards NGOs. 3) Commitment to process, the PPPA Service shows a commitment to maintaining the collaboration process with clear stages, legal basis and form of commitment. 4) Share understanding has been carried out well through routine socialization activities. 5) Intermediate outcomes can be seen from the benefits, namely cooperation between collaborative actors which is felt to have been implemented. Although it has not been completely successful because there are obstacles in its implementation. The measure of the success of collaboration can be seen from 3 things 1) Trust between participants in dealing with juvenile delinquency has been well established, because every time there is something related to juvenile delinquency, the police are also open about this information. 2) Indicator of commitment to goals, stakeholders demonstrate commitment to goals by carrying out prevention efforts and activities related to dealing with juvenile delinquency. 3) information sharing is carried out well by the stakeholders involved, they share information both with fellow perpetrators and with the community regarding juvenile delinquency. The author suggests optimizing supervision and deeper monitoring of adolescent activities.

**Keywords:** *Collaborative, Governance, Juvenile Delinquency*